

Laporan Penelitian

# KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TK. II KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Oleh : 1. H. AZHAR RADEF, SH. Ketua Pelaksana  
2. Hj. ERNIELLA AHMAD, SH Anggota  
3. SJAMSINAR ADIK, SH. Anggota  
4. DIDI NAJMI, SH. Anggota  
5. YUNITA SYOFYAN, SH. Anggota



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan  
Fasilitas Universitas Andalas 1992/1993

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

( oleh : Azhar Reoef, SH. ; Ermiellah Ahmed, SH. ; Sjamsinar  
Adik, SH. ; Didi Najimi, SH. ; Yunita Syofyan, SH.  
Tahun 1993 )

ABSTRAK

Berbicara tentang otonomi daerah, kita tidak dapat memisahkan dari sumber pembiayaan. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah akan banyak ditentukan oleh faktor penda-  
naan. Dewasa ini daerah-daerah otonom selalu dihadapi o-  
leh kendala kecilnya kemampuan keuangan daerah. Kemampuan  
keuangan daerah cenderung diidentikan dengan Pendapatan As-  
li Daerah.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa terdapat  
potensi daerah yang disebut dengan Bagi Hasil Pajak dan  
bukan pajak. Jika selama ini orang cenderung membandingkan  
Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah, maka disini akan dicoba melihat dari segi  
sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap keseluruhan Pen-  
dapatan Asli Daerah dan Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak .

Lemahnya kemampuan keuangan daerah telah menimbul-  
kan minat bagi peneliti untuk mengkaji, apakah kewenangan  
yang selama ini telah diserahkan berdasarkan Undang-un -  
dang Darurat No. 11 dan No. 12 tahun 1957 serta undang-  
No. 31 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan  
Daerah telah dikelola secara optimal ? Terlihat beberapa  
jenis pajak dan retribusi yang belum dikelola oleh Daerah  
Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman. Hal itu jelas dari  
segi obyek pajak, segi ketentuan yuridis dan bahkan dari  
segi personil merupakan faktor yang menjadi kendala dalam  
meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

oooOooo

## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Later belakang masalah

Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah berlaku  $\pm$  18 tahun. Dilihat dari masa berlakunya undang-undang tersebut lebih lama usianya jika dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 22 tahun 1948; Undang-undang No. 1 tahun 1957 dan Undang-undang No. 18 tahun 1965. Dari segi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang No. 5 tahun 1974 jauh lebih baik karena menganut asas dekonsentrasi sebagai perekat hubungan antara Pusat dengan Daerah.

Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mendasar adalah dianutnya "Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab". Kemudian di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR 1978 mengalami pemekaran dengan sebutan "Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab". Hakikat dari prinsip otonomi yang dianut tersebut adalah bagai mana supaya daerah mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Untuk dapat mampu mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya daerah perlu mempunyai sumber keuangan sendiri yang potensial.

Jika disimak lebih lanjut tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah tidak hanya sekedar memungkinkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal itu dimaksudkan pula guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Untuk itu daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka titik berat otonomi dile-

## BAB. V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Penelitian

Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Dewasa ini Daerah Tingkat II Padang Pariaman terdiri dari 24 Kecamatan dan Perwakilan Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pariaman Utara
2. Kecamatan Pariaman Tengah
3. Kecamatan Pariaman Selatan
4. Kecamatan Sungai Uringging
5. Kecamatan Perwakilan Sungai Uringging
6. Kecamatan Sungai Limau
7. Kecamatan Perwakilan Sungai Limau
8. Kecamatan V Koto Kampung Dalam
9. Kecamatan Perwakilan V Koto Kampung Dalam
10. Kecamatan Wan Sebaris
11. Kecamatan Perwakilan Wan Sebaris Ulekan
12. Kecamatan VIII Koto
13. Kecamatan Perwakilan VII Koto Padang Sago
14. Kecamatan Perwakilan Kebun Pondok Duo
15. Kecamatan Perwakilan 2 X 11 enam lingkungan
16. Kecamatan Perwakilan Kayu Tanam
17. Kecamatan Perwakilan Pekandangan
18. Kecamatan Lubuk Alung
19. Kecamatan Perwakilan Lubuk Alung
20. Kecamatan Perwakilan Batang Anai
21. Kecamatan Siberut Selatan
22. Kecamatan Siberut Utara
23. Kecamatan Sipore
24. Kecamatan Pagai Utara/Selatan

Kabupaten Padang Pariaman sebagai Daerah otonom sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1974 memiliki sum-

## BAB. VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bagian terdahulu laporan penelitian ini, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia dewasa ini terlihat suatu masalah yang sangat menonjol yaitu pembiayaan urusan pemerintahan, dimana daerah-daerah masih sangat tergantung kepada subsidi Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah belum lagi mempunyai makna yang menentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Di daerah suatu potensi yang besar selain Pendapatan Asli Daerah adalah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Sebetulnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ini juga dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dilihat dari sumbernya idealnya ini dimasukkan kelompok Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya masih dipisahkan dari Pendapatan Asli Daerah.
3. Di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman terdapat lima pengelompokan Pendapatan Asli Daerah yaitu:
  - Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Hasil Laba Perusahaan Daerah
  - Penerimaan dari dinas-dinas daerah
  - Penerimaan lain-lainDari lima kelompok penerimaan itu untuk tahun 1990/91 dan 1991/1992 penerimaan dari dinas-dinas daerah tidak ada lagi namun belum dihapus dari pengelompokan penerimaan PAD.
4. Penerimaan Daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dapat diberdakan atas :
  - a. Bagi Hasil Pajak
    - Pajak Bumi dan Bangunan
  - b. Bagi Hasil Bukan Pajak

- Iyuran Hasil Hutun
- Sumbangan Rehabilitasi cengkeh
- Penerimaan hasil bunga pasir
- Penerimaan Hasil Perikanan

5. Memperhatikan pajak-pajak dan retribusi yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman, masih banyak obyek pajak yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah tetapi belum lagi dipungut oleh daerah, diantaranya :

- Pajak sekolah
- opsen Bir
- Pajak atas pompa air
- Opsen atas PRT
- Pajak Hiasan kuburan
- Pajak asuransi
- dan lain-lain

Sedangkan retribusi yang belum dipungut diantaranya adalah :

- Retribusi tempat rekreasi
- Bea Pangkalan
- Bea Penambangan
- Retribusi kendaraan diatas air
- dan lain-lain.

6. Kontribusi PAD terhadap Keseluruhan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

1. tahun 1986/1987	= 52,5 %
2. tahun 1987/1988	= 46,6 %
3. tahun 1988/1989	= 51,4 %
4. tahun 1989/1990	= 35,5 %
5. tahun 1990/1991	= 34,4 %
6. tahun 1991/1992	= 35,5 %

7. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PAD masih ditemui kendala yaitu :

- luasnya obyek pajak dan retribusi daerah
- serana yuridis Perda yang cenderung terlambat diubah
- masalah personil.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman, Beberapa pemikiran tentang otonomi daerah, P.T Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
2. Ateng Syafrudin, Pemerintahan Daerah dan Pambangunan Sumber, Bandung, 1973.
3. Bagirmanan, Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan, kerangan majalah Unpad, Binacipta Bandung, 1974.
4. Ibu Syamsi, Dasar-dasar kebijaksanaan keuangan Negara, Aksara, Jakarta, 1983.
5. J. Wajong, Administrasi keuangan Daerah, Ichtiar, Jakarta, 1975.
6. Jehanez Fernandez, Mencari bentuk otonomi daerah dalam Upaya memacu Pembangunan Regional masa depan, Makalah, dalam majalah JIIS, Jakarta, 1992.
7. Jimmi Muhamad Ibrahim, Prospek otonomi Daerah, Dehara Prize, Semarang, 1991.
8. Josep Riwo Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1988.
9. Sujanto, Cakrawala Otonomi Daerah, Siner Grafika, Jakarta, 1988.
10. -----, Prospek otonomi daerah, Rineka Cipta, Jakarta 1990.
11. Soehino, Perkembangan pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1980.
12. Wajong, J. Asas dan tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan, Jakarta 1975.

oooOooo